



## MENGATASI KEJAHATAN JALANAN

# Perlu Penanganan Komprehensif dan Lintas Sektoral

**YOGYA (KR)** - Terjadinya kasus kejahatan jalanan baru-baru ini yang sampai merenggut korban jiwa, betul-betul memprihatinkan dan sangat disayangkan. Dari peristiwa itu, sudah terjadi adanya pelanggaran hukum yang tentu saja pelaku akan menjadi orang yang berhadapan dengan hukum. Bila pelakunya adalah pelajar, maka akan berdampak pada masa depan. Karena pelaku kejahatan jalanan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

"Kejahatan jalanan yang terus terjadi ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan upaya penegakan hukum oleh pihak kepolisian semata. Tetapi harus diselesaikan secara komprehensif, lintas sektoral seluruh stakeholder dan bersifat kolaboratif," kata Kepala Biro Organisasi dan Kaderisasi PGRI DIY sekaligus Kepala Balai

Dikmen Kulonprogo, Rudy Prakanto MEng di Yogyakarta, Rabu (6/4).

Rudy menyatakan proses penyelesaian "kejahatan jalanan harus melibatkan satuan pendidikan, orangtua, juga masyarakat, di samping perangkat daerah sesuai ketugasannya. Sehingga diharapkan penyelesaiannya da-

pat tuntas dan sampai ke akar permasalahannya. Hal itu penting, karena kejahatan jalanan tidak dapat diselesaikan dengan hanya diskusi tetapi harus dengan aksi.

Beberapa hal dapat dilakukan untuk mencegah kejahatan jalanan. Di antaranya melengkapi sarana prasarana di seluruh wilayah yang rawan kasus dengan memasang CCTV dan lampu penerangan jalan secara massif. "Tidak kalah penting adalah adanya kerja sama dan jalinan komunikasi intensif antara satuan pendidikan dengan orangtua dan ketua RT di lingkungan siswa. Sehingga dapat diantisipasi apabila ada aktivitas menyimpang seawal mungkin. Selain itu perlu digiatkan kembali jam

belajar masyarakat, dan kegiatan karang taruna," papar Rudy seraya menambahkan, tindakan itu perlu dilakukan untuk meminimalisasi para pelajar melakukan konvoi atau bergerombol yang bisa memicu kejahatan jalanan.

Menurut Rudy, sosialisasi terhadap siswa di sekolah, terkait pelanggaran dan persoalan-persoalan hukum yang akan dihadapi para siswa oleh kepolisian tetap perlu digencarkan. Di sini peran guru Bimbingan dan Konseling sangat penting dalam proses penguatan komunikasi intensif antara sekolah dan orangtua serta masyarakat yang dilakukan oleh Ketua RT. Di samping itu penguatan pendidikan karakter di sekolah sangat perlu untuk dioptimalkan. (Ria)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan			

Yogyakarta, 21 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005